

Strategic plan for the working area development of fishing port for optimum services

Rencana strategis pengembangan wilayah kerja pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan secara optimal

Franky Y. Watung^{1*}, K.W.A. Masengi², and Heffry V. Dien²

¹Program Studi Ilmu Perairan, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Jl. Kampus Unsrat Kleak, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia

²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi. Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia

* E-mail: frankywatung76@gmail.com

Abstract: This study examines the working area development of fishing port to support optimal operations and services. The purpose of this study is to examine the working area coverage in the sea and land operations based on the ratio conditions of spatial utilization and sea operation in 2025, and to examine the implementation of IUU Fishing control in the fishing port and the carrying capacity of the port, based on the provisions of Ocean Fishery Port class. This study included primary and secondary data. The former was collected through interviews using questionnaires. The analysis applied SWOT, starting with identification of internal and external factors. Results found several development strategies including fishing port working area development of Bitung Fishing Port, fishermen's residential area development, inter-sectoral coordination synergy, raw material availability for strengthening fisheries industries, sustainable and responsible fish resources management, human resources capacity building, law enforcement, information technology applications, standard dock development, and regulation consolidation.

Keywords: Strategic plan; fishing port; Bitung; Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengembangan wilayah kerja pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional dan pelayanan pelabuhan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji luas wilayah kerja operasional laut dan daratan berdasarkan kondisi rasio pemanfaatan ruang wilayah kerja dan operasional laut pada tahun 2025, mengkaji kondisi pelaksanaan pengendalian IUU Fishing di pelabuhan perikanan dan kondisi daya dukung dermaga, yang disesuaikan dengan ketentuan kelas Pelabuhan Perikanan Samudera. Data diperoleh dengan metode wawancara menggunakan kuisioner. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis SWOT, dengan langkah awal mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Hasil yang diperoleh berupa strategi pengembangan, antara lain, memperluas WKOPP PPS Bitung, menetapkan kawasan pemukiman nelayan, sinergitas koordinasi antar sektor, penguatan ketersediaan bahan baku industri perikanan, pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, penegakan hukum, aplikasi teknologi informatika, pengembangan dermaga sesuai standar, dan konsolidasi regulasi.

Kata-kata kunci: Rencana strategis; pelabuhan perikanan; Bitung; Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan penetapan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, perlu diidentifikasi data dan informasi yang mendukung penetapan koordinat dari wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan. Penjelasan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor

PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan (Anonymous, 2006). Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah suatu tempat yang merupakan bagian dari daratan dan perairan, yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan. Sedangkan, pengertian wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan adalah wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan.

Peranan pelabuhan perikanan sangat penting, sehingga kebijakan Pemerintah RI menyediakan

prasarana perikanan, berupa pelabuhan perikanan, merupakan upaya untuk mendukung program pembangunan perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara, merupakan suatu wujud konsistensi kebijakan pemerintah, mengingat urgensi dan lokasi yang strategis dalam memanfaatkan potensi perikanan di WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau) dan di WPP 716 (Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Laut Halmahera), sesuai Permen KP No. 30/MEN/2012, pasal 37 (Anonymous, 2012). Pengertian tentang kegiatan pelabuhan perikanan sudah cukup jelas, yakni sebagai tempat berlabuh kapal/perahu perikanan dan tempat melakukan kegiatan bongkar muat sarana produksi dan produksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji luas wilayah kerja operasional laut dan daratan yang didasarkan pada kondisi eksisting rasio pemanfaatan ruang wilayah kerja dan operasional laut pada tahun 2025, mengkaji kondisi pelaksanaan pengendalian *IUU Fishing* di pelabuhan perikanan dan kondisi daya dukung dermaga, yang sesuai dengan ketentuan kelas Pelabuhan Perikanan Samudera.

MATERIAL DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) (Anonymous, 2014), meliputi kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung), yang secara administrasi terletak di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, PPS Bitung terletak pada posisi $01^{\circ} 26' 42''$ Lintang Utara dan $125^{\circ} 12' 24''$ Bujur Timur. Metoda penelitian menggunakan metode deskriptif.

Prosedur Pengambilan Sampel

Jenis data yang dikumpul meliputi hal-hal yang terkait dengan permasalahan pengembangan WKOPP. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga/instansi terkait, yaitu Dinas Perikanan Kota Bitung, Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Di samping itu, dilakukan studi kepustakaan dan mendengar pendapat ahli untuk memperkuat analisis yang dilakukan.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan SWOT. Tahap awal pelaksanaan analisis SWOT, yaitu melakukan indentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Faktor internal ini ditinjau dari 10 aspek WKOPP, yaitu: 1) peran PPS Bitung dalam pengelolaan sumber daya ikan di WPP 715 dan 716, 2) visi dan misi PPS Bitung, 3) kondisi daya dukung dermaga, 4) struktur armada perikanan, 5) pendataan produksi perikanan tangkap, 6) ketersediaan logistik di PPS Bitung dalam mendukung operasional kapal perikanan, 7) daya dukung industri perikanan di PPS Bitung, 8) penerapan regulasi terkait kesyabandaran, 9) pengembangan dan pembinaan nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) kapal perikanan, dan 10) kompetensi sumber daya manusia (SDM) PPS Bitung.

Setelah faktor internal, maka faktor eksternal juga indentifikasi, yaitu: 1) potensi perikanan di WPP 715 dan 716, 2) kebijakan program pengembangan kawasan andalan oleh pemerintah daerah, 3) tujuan pemasaran produk hasil perikanan, 4) kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Bitung untuk 5 tahun terakhir, 5) koordinasi dengan instansi terkait, 6) pengembangan kawasan pemukiman nelayan, 7) penyalahgunaan tenaga kerja asing, 8) potensi *IUU Fishing*, 9) tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait sumber daya ikan (SDI), dan 10) ketaatan kapal perikanan

Pada saat pengisian input (*input stage*) digunakan dua matrik, yaitu matriks IFE (*Internal Faktor Evaluation*) dan matriks EFE (*External Faktor Evaluation*). Kemudian, pada tahap pemanduan (*Matching Stage*) digunakan IE (*Internal-External*). Matriks IE digunakan untuk menentukan kawasan PPS Bitung, sedangkan SWOT digunakan untuk menghasilkan strategi yang sesuai dengan kondisi internal-eksternal (Rangkuti, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal, terdapat beberapa faktor kunci “kekuatan” (S) dan “kelemahan” (W) terhadap pengelolaan pelabuhan perikanan. Seluruhnya terdapat 5 faktor kunci S dan W (Rangkuti, 2013).

Hasil analisis matrik IFE “kekuatan” (S) adalah (dengan skor tertinggi) sebagai berikut:

1. Peran PPS Bitung (0,80)
2. Visi dan Misi PPS Bitung (0,75)
3. Ketersediaan logistik di PPS Bitung (0,75)

Ketiga faktor kunci tersebut di atas merupakan kekuatan utama yang harus dioptimalkan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan sampai tahun 2025. Sedangkan “kelemahan” (W) utama di dalam pengelolaan pelabuhan perikanan adalah (dengan skor tertinggi):

1. Pengembangan kawasan pemukiman nelayan (0,03)
2. Penyalahgunaan tenaga kerja asing (0,02)

Skor untuk faktor “peluang” (O) adalah 3,25; sedangkan skor untuk faktor “ancaman” (T) adalah 0,73. Jadi, pelabuhan perikanan memiliki faktor “peluang” lebih besar daripada faktor “ancaman”, sehingga dapat memanfaatkan “peluang” tersebut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelabuhan perikanan.

Total skor dari matrik EFE menunjukkan, bahwa upaya pengelolaan pelabuhan perikanan berada pada posisi yang kuat. Hal ini menuntut pengelola pelabuhan perikanan lebih mengoptimalkan kekuatan eksternal yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan eksternal, terdapat beberapa faktor kunci “peluang” (O) dan “ancaman” (T) terhadap pengelolaan pelabuhan perikanan. Seluruhnya, terdapat 5 faktor kunci “peluang” (O) dan 5 faktor kunci “ancaman” (T).

Hasil analisis matrik EFE menunjukkan, bahwa “peluang” (O) dengan skor tertinggi adalah:

1. Potensi Perikanan di WPP 715 dan 716 (0,78)
2. Kebijakan program pengembangan kawasan andalan oleh pemerintah daerah (0,78)
3. Tujuan pemasaran produk hasil perikanan (0,78)

Ketiga faktor kunci tersebut di atas merupakan “peluang” (O) utama yang harus dioptimalkan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan sampai tahun 2025.

Kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan hendaknya dapat diterima oleh semua kalangan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Semua kebijakan tersebut dirumuskan di dalam rencana tindak. Adapun rencana tindak tersebut, yang dapat direkomendasikan berdasarkan 10 prioritas kebijakan terkait pengelolaan pelabuhan perikanan, adalah, sebagai berikut: 1) memperluas WKOPP PPS Bitung, 2) menetapkan kawasan pemukiman nelayan, 3) sinergitas koordinasi antar sektor, 4) memperkuat ketersediaan bahan baku industri

perikanan, 5) pengelolaan SDI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, 6) memperkuat kompetensi SDM, 7) penegakan hukum, 8) aplikasi teknologi informatika, 9) mengembangkan dermaga sesuai standar, dan 10) konsolidasi regulasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 3 hal, yaitu:

1. Kondisi eksisting rasio pemanfaatan ruang wilayah kerja dan wilayah operasional laut WKOPP PPS Bitung belum optimal, karena minimnya sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki oleh sebuah pelabuhan perikanan berkelas samudera (Tipe A).
2. Kondisi pelaksanaan pengendalian *IIIU Fishing* di pelabuhan perikanan belum berlangsung dengan baik, karena sinergitas antar sektor terkait belum terkordinasi dengan baik.
3. Kondisi daya dukung dermaga belum sesuai dengan ketentuan kelas pelabuhan perikanan samudera.

REFERENSI

- ANONYMOUS (2006) *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan*, No. PER.16/MEN/2006 Tentang Pelabuhan Perikanan.
- ANONYMOUS (2012) *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan*, No. 30/MEN/2012 tentang *Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*.
- ANONYMOUS (2014) *Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Semudera Bitung*. Bitung: Pelabuhan Perikanan Samudera.
- RANGKUTI, F. (2013) *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

*Diterima: 1 Juni 2015
Disetujui: 5 Juli 2015*